

Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi Yang Rasional Dan Spesifik

Roch. Eddy Prabowo

Abstrak

Demokrasi Pancasila lebih memiliki landasan berpikir yang rasional dan spesifik dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat (Komunis). Demokrasi Liberal meletakkan kebebasan individu sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai individu yang bebas. Demokrasi Rakyat meletakkan dasar kemasyarakatan sebagai pola pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia hidup dalam pola struktur persekutuan (*commune structure*). Demokrasi Pancasila meletakkan hikmat kebijaksanaan (akal sehat) sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai makhluk berpikir.

Mengingat dalam demokrasi membuka ruang gerak untuk berbeda pendapat, maka perbedaan itu harus dipandang sebagai modal dasar bagi perkembangan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam mengelola perbedaan membutuhkan akal sehat, bukan individu yang bebas maupun individu yang terbelenggu oleh kemasyarakatan. Dengan akal sehat, maka perbedaan akan menjadi berkah bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia beserta alam lingkungannya.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, Demokrasi Komunis, akal sehat, rasional, individualis, sosialis.

C. Pendahuluan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selama ini belum membiasakan pengalaman & nilai-nilai kehidupan demokrasi sosial kemasyarakatan yang riil, dengan melibatkan mahasiswa dan seluruh civitas akademika dalam berbagai aktivitas, baik di kelas (kampus) maupun di luar kampus (Zuriah dalam Bestari, 2010: 140). Hal ini dapat saja terjadi, a.l. disebabkan oleh sikap dan perilaku yang lebih dominan otokrasi dari para individu maupun sikap dan perilaku yang masih dalam proses pencarian model demokrasi di lingkungan kita.

Alasan pertama, dapat diamati antara lain dari sikap dan perilaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY; Presiden RI ke-6) yang lebih memaksakan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan cara pemilihan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta daripada pengisian dengan cara penetapan yang diinginkan oleh DPRD DIY dan masyarakat Yogyakarta melalui Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin, 13 Desember 2010. Alasan kedua nampak dari para politikus maupun beberapa tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan ilmuwan yang belum paham tentang Demokrasi Pancasila. Sebagai contoh adalah tayangan salah satu TV Swasta Nasional yang menyiarkan secara langsung wawancara tokoh LSM yang memprakarsai kerbau bertopeng SBY dan beberapa politikus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menyatakan, bahwa masyarakat masih dalam proses mencari bentuk demokrasi yang ideal bagi masyarakat

Dimanakah letak kerasionalan dan kespesifikasikan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat?

Mengapa justru di Indonesia Demokrasi Pancasila terpendam oleh praktik-praktik Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat?

B. Pembahasan

2. Letak kerasionalan dan kespesifikasikan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat

Untuk menemukan letak kerasionalan dan kespesifikasikan-an Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat, maka langkah yang pertama kali dilakukan adalah dengan membandingkan dasar dan falsafah dari ketiga demokrasi tersebut. Adapun langkah kedua adalah dengan membahas secara mendalam tentang Demokrasi Pancasila.

Tabel 1. Perbandingan Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat, dan Demokrasi Pancasila

Faktor Pembeding	Demokrasi Liberal	Demokrasi Rakyat	Demokrasi Pancasila
Dasar pelaksanaan	Kebebasan individu	Kemasyarakatan	Hikmat kebijaksanaan (akal sehat)
Falsafah yang digunakan	Manusia sbg individu yang bebas	Manusia sbg komponen terkecil masyarakat	Manusia sbg mahluk berpikir

gerakan reformasi tahun 1999 di Indonesia. Hal ini sangat wajar terjadi, karena euforia yang terjadi selama ini adalah berpolitik dengan hati nurani bukan berpolitik dengan akal sehat sebagaimana diajarkan oleh Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila mengajarkan menggunakan akal sehat sebagai pemimpin dalam permusyawaratan. Permusyawaratan merupakan pada kata dari perundingan (Depdiknas, 2005). Perundingan baru akan dilakukan, manakala terjadi perbedaan pendapat. Hal ini mengacu pada ajaran Al-Qur'an yang secara tegas mengajarkan, "apabila kamu berbeda pendapat, maka segeralah bermusyawarah." Bermusyawarah adalah proses perundingan, dengan kata lain musyawarah adalah berkumpulnya orang-orang yang berbeda pendapat untuk mendapatkan rumusan pendapat yang benar.

Musyawarah tidak mengajarkan pembuatan keputusan dengan cara pemilihan suara (voting), karena voting merupakan ajaran dari Demokrasi Liberal. Keputusan dengan cara voting belum tentu benar, karena yang dijadikan standar pengambilan keputusan adalah suara terbanyak. Bisa jadi keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang akan menyengsarakan orang banyak dan hanya mensejahterakan sekelompok orang saja. Hal ini tidak perlu dipikirkan yang penting adalah keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur, yaitu suara terbanyak. Keputusan yang demikian dapat terjadi, bahkan sering terjadi, karena sekelompok orang yang akan diuntungkan mampu membayar kepada para pengambil keputusan.

Amerika yang sangat mementingkan individu dengan demokrasi fasistis ala komunis yang menempatkan kepentingan negara yang paling utama.”

Akibat dari kurangnya referensi yang benar-benar mengupas tentang Demokrasi Pancasila dan begitu kuatnya eforia Demokrasi Liberal oleh para politikus dan elit kenegaraan, maka Demokrasi Pancasila tidak begitu tampak dalam praktik-praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar Demokrasi Pancasila mendapat eforia di NKRI, maka masing-masing WNI harus mempelajari dan mempraktikkan Demokrasi Pancasila dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bestari, dkk, 2010
- Depag RI, 1985, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia
- Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Kaelan dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Paradigma.
- Komalasari, Kokom, dkk, 2010
- Prabowo, Rokh Eddy, 2009, *Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Berwawasan Global berjiwa Lokal*, Makalah Pendamping Seminar Internasional, Bandung, UPI.
- Zamin, Muh., 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jilid Pertama, Jakarta, tanpa penerbit.
- [wikipedia.org/wiki/Pemilihan Umum-Presiden-Amerika-Serikat.2008](http://wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum-Presiden-Amerika-Serikat.2008)